BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi dunia internasional yang semakin rumit dan adanya sifat saling ketergantungan membuat setiap negara tidak mempunyai pilihan lain untuk tidak melakukan dan mengembangkan kerjasama internasional yang tetap berpedoman pada aspek kepentingan nasionalnya. Hubungan internasional merupakan suatu bentuk interaksi yang dilakukan antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat yang lain.

Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan (Perwita & Yani, 2005 : 33).

Saat ini seiring dengan semakin kompleks dan dinamisnya dimensi hubungan internasional, yang kemudian memaksa bagi setiap aktor dan pihak internasional untuk bekerjasama dalam satu isu di sebuah kawasan yang kemudian

menjadikan isu tersebut menjadi perubahan transnasional, dimana kemudian tidak dapat dielakkan terlibatnya aktor atau pihak lain untuk saling bekerjasama, walaupun di kawasan lain dari tempat terjadinya masalah tersebut (http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=8697&type=10 #.VtzSoPl97Dd diakses pada 24 Februari 2016). Salah satu isu yang juga dibahas dalam studi hubungan internasional yaitu isu lingkungan hidup, dimana isu ini termasuk dalam isu yang sering diangkat dalam agenda internasional.

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Dua dasawarsa kemudian isu lingkungan hidup diangkat kembali dalam Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992, yang sebelumnya diawali dengan Konferensi PBB mengenai perubahan iklim dunia di Montreal, Kanada tahun 1990. Kerjasama internasional dalam menangani isu lingkungan hidup global diarahkan untuk mencari kesepakatan ukuran-ukuran, patokan-patokan dan norma-norma internasional yang sah serta cara penerapannya. Pembuatan patokan, ukuran dan norma standar ini dibutuhkan untuk mendefinisikan prinsip umum penanganan kolektif dan membuat aturan serta proses yang tepat – pembentukan rezim internasional– dalam dimensi lingkungan hidup. Lebih lanjut, proses implementasi rezim lingkungan hidup internasional nantinya akan merupakan suatu proses dimana anggota rezim harus mengumpulkan, menukar serta membahas informasi yang berkaitan dengan isu yang diangkat rezim

tersebut. Proses implementasi rezim ini terdiri dari tahap pertukaran data dan informasi, analisis data, serta penilaian terhadap proses implementasi yang telah dilakukan oleh negara anggota (Perwita & Yani, 2005 : 143-145).

Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa isu lingkungan menjadi salah satu fokus penting dalam hubungan internasional. Yang pertama, beberapa masalah lingkungan hidup sudah menjadi permasalahan global. Seperti emisi gas yang menyebabkan perubahan iklim di seluruh dunia. Yang kedua, beberapa masalah lingkungan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya yang dimiliki bersama. Contohnya jika pembuangan limbah dilakukan di laut perbatasan dua negara tentu dampaknya juga akan mengenai kedua negara tersebut. Yang ketiga, banyak masalah lingkungan yang sifatnya transnasional dan tak terikat oleh batas wilayah. Yang keempat, meskipun permasalahnnya hanya tingkat lokal, namun dialami lintas negara. Yang kelima, permasalahan lingkungan berkaitan juga dengan ekonomi-sosial maupun politik (Greene, 2001 : 387-414). Melihat berbagai alasan tersebut, ada banyak negara yang berkomitmen untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi isu lingkungan hidup. Salah satu contoh kerjasama yang dilakukan yaitu yang bergerak dalam bidang konservasi laut yang dilakukan secara trilateral oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi.

Laut Sulu adalah sebuah laut besar di bagian barat daya Filipina, yang dipisahkan dari Laut China Selatan di barat laut oleh Palawan, dan dari Laut Sulawesi di tenggara oleh Kepulauan Sulu. Borneo ada di barat daya dan Visayas di timur laut. Laut Sulu memiliki sejumlah pulau. Kepulauan Cuyo dan Cagayan de Sulu adalah bagian provinsi Palawan sedangkan Cagayan de Tawi-Tawi dan

Kepulauan Kura-Kura merupakan bagian provinsi Tawi-Tawi. Laut Sulu juga tempat dimana Taman Laut Nasional Karang Tubbataha, salah satu sirus warisan dunia terletak. Sedangkan Laut Sulawesi di barat Samudera Pasifik dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau Mindanao, Filipina, di utara, di timur oleh rantai Kepulauan Sangihe, di selatan oleh Sulawesi, dan di barat oleh Kalimantan, Indonesia. Karakteristik utama ekoregion Laut Sulawesi adalah keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Ekoregion Laut Sulawesi merupakan bagian dari *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion*, mencakup perairan Kepulauan Derawan di bagian barat sampai dengan Sanger Talaud dan Taman Nasional Bunaken di bagian timur. Wilayah ini juga merupakan jalur migrasi mamalia laut dari Samudera Pasifik ke Selat Makassar menuju Samudera Hindia. Terdapat 26 spesies mangrove ditemukan di Kabupaten Berau (Tanjung Batu, Delta Berau, sampai ke selatan di Biduk-biduk). Hutan mangrove dapat ditemukan di beberapa pulau, seperti Pulau Panjang, Rabu-rabu, Semama dan Maratu di bagian utara pesisir Berau. Secara keseluruhan luas mangrove di Berau sebesar 80.277 ha, terdiri dari spesies bakau (*Rhizophora sp*), api-api (*Avicennia sp*), nipah (*Nypa fruticans*), dan lain-lain.

Laut Sulu-Sulawesi merupakan salah satu dari sekitar 200 ekoregion penting di dunia, memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi yang terletak di puncak dari segitiga karang dunia (*coral triangle area*) – wilayah di mana jumlah spesies karang, ikan, moluska, magrove, lamun dan ganggang merupakan yang tertinggi di dunia (http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabaru/176-pertemuan-ke-7 diakses pada 24 Februari 2016). Untuk itulah dilakukan suatu upaya

konservasi untuk melindungi dan mengelola wilayah Laut Sulu-Sulawesi ini sehingga keanekaragaman hayati serta wilayah Laut Sulu-Sulawesi terhindar dari segala bentuk ancaman-ancaman yang dapat merusak kestabilan dari Laut Sulu-Sulawesi itu sendiri sebagai salah satu ekoregion penting di dunia.

Ekosistem terumbu karang dari Laut Sulu-Sulawesi mendukung beragam kegiatan perikanan dan memberikan hasil ikan tahunan sebesar 675.380 metrik ton. Keragaman biota laut yang tinggi ini berdampak pada ekosistem yang sehat yang menyediakan jasa ekosistem seperti pangan dan kemampuan untuk mengatasi bencana dan dampak yang disebabkan oleh alam dan manusia (http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabaru/176-pertemuan-ke-7 diakses pada 24 Februari 2016). Wilayah perairan ini mengandung keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang memang cukup melimpah.

Selain itu, terdapat 400 spesies ganggang, 19 spesies tanaman bakau, 15 spesies ular laut 10 spesies burung pesisir pantai yang bertempat tinggal di hutan bakau, dan juga 25 spesies burung yang bermigrasi secara musiman (UNDP, 2009 : 5). Keanekaragaman hayati tersebut tentunya merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang wilayah perairan ini masuk kedalam wilayah negaranya.

Bentangan Laut Sulu-Sulawesi yang terletak di antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut di dunia. Bentangan laut ini mencakup area seluas 900.000 kilometer persegi (hampir 350.000 mil persegi) dan menyediakan mata pencaharian dan makanan bagi lebih dari 40juta orang (http://www.conservation.org/global/indonesia/tentang/bentan

g_laut/sulu-sulawesi/Pages/bentang_laut_sulu_sulawesi.aspx diakses pada 24 Februari 2016). Sebagian besar dari jumlah populasi begitu bergantung pada sektor perikanan wilayah tersebut.

Dari area seluas 900.000 kilometer persegi, wilayah Laut Sulu dan Laut Sulawesi merupakan wilayah utamanya, dan juga meliputi beberapa perairan kepulauan seperti Laut Sibuyan, Laut Visayan, Laut Camotes dan Laut Bohol dimana keempat perairan kepulauan tersebut termasuk sebagai wilayah perairan Filipina. Dikarenakan kedua laut ini secara geografis dikelilingi oleh wilayah tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina, maka kedua laut ini menurut *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dikategorikan sebagai laut semi tertutup.

Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap memperhatikan, manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan. Konservasi itu sendiri berasal dari kata *Conservation* yang terdiri atas kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wise use*). Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Konservasi dalam pengertian sekarang sering diterjemahkan sebagai *the wise use of nature resource* (pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana).

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, konservasi sumber daya alam adalah pengelolah sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbarui menjamin kesinambungan untuk persediannya dengan tetap memlihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Ada tiga hal utama yang ada dalam konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya.

Banyak spesies laut dan habitat di bentangan Laut Sulu-Sulawesi terancam oleh penangkapan yang berlebihan, polusi, pembangunan kawasan pesisir dan sedimentasi. Selain itu, mata pencaharian masyarakat setempat terancam seiring menurunnya stok ikan dan meningkatnya penangkapan ikan komersil, yang menyisakan hanya sedikit ikan bagi konsumsi lokal. Naiknya permukaan laut meningkatkan pula suhu laut. Tingkat keasaman air laut dan memutihnya karang karena perubahan iklim berdampak tidak hanya pada kerentanan spesies dan ekosistem, tapi juga pada masyarakat yang bergantung pada perikanan dan wisata

sebagai mata pencaharian mereka (http://www.griyawisata.com/nasional/sulawesi-island/artikel/lika-liku-laut-sulu-sulawesi diakses pada 24 Februari 2016).

Dalam wilayah perairan Laut Sulu-Sulawesi, terdapat beberapa isu-isu yang dapat mengancam integritas wilayah perairan Laut Sulu-Sulawesi. Baik isu yang disebabkan oleh faktor alam maupun yang disebabkan oleh faktor manusia, menjadikan wilayah ini rentan terhadap perubahan-perubahan yang dapat melemahkan integritas dari wilayah perairan Laut Sulu-Sulawesi yang merupakan salah satu pusat biodiversitas dunia. Setidaknya ada empat isu yang dapat mengancam integritas di wilayah ini.

Pertama, adalah pembangunan yang terjadi di wilayah daratan (*land-based development*) dimana yang menjadi permasalahan utamanya adalah perkembangan lahan pertanian yang merenggut wilayah perhutanan, sementara dalam proses perkembangan tersebut dilakukan aktivitas penebangan pohon (*logging*) agar wilayah perhutanan yang telah ditebang dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Hilangnya wilayah perhutanan maka akan berpengaruh terhadap proses dari hidrologi yang terjadi di wilayah itu, dan pada akhirnya akan berdampak terhadap lingkungan di laut. Kedua, adalah kualitas dari air bersih (*freshwater quality*) dimana isu ini berhubungan secara langsung dengan isu pertama. Setiap pembangunan di wilayah daratan, menggunakan sistem pembuangan limbah. Masih sangat rendah investasi pemerintah terhadap sistem pembuangan limbah yang ramah lingkungan. Limbah pada akhirnya menuju ke laut. Ketiga, adalah eksploitasi perikanan yang dilakukan secara berlebihan (*unsustainable exploitation of fish*). Menurut data pada tahun 1996 diperkirakan

bahwa 44% dari penduduk Indonesia, 42% dari penduduk Filipina, dan 16% dari penduduk Malaysia bergantung dari sektor perikanan. Keempat, adalah polusi air oleh sektor pariwisata dan sektor industri kelautan (*tourism and ship-based pollution*). Banyak para wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi wilayah yang mengandung kekayaan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Pada tahun 1987 hingga pada tahun 1995 tingkat wisatawan yang berkunjung ketiga negara cukup meningkat, terutama wisatawan ke Indonesia dengan 37,5% per tahun. Malaysia dengan 11,2% per tahun serta Filipina 15,7% per tahun (Noel, 2003 : 120).

Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk pengelolaan konservasi dan sumber daya perikanan di ekoregion Laut Sulu-Sulawesi. Dimulai sejak tahun 2001 yang diikuti dengan kesepakatan komitmen dan visi bersama hingga penyusunan dokumen rencana aksi bersama yang tertuang dalam Program Aksi Konservasi Ekoregion / *Ecoregion Conservation Plan (ECP) SSME* pada tahun 2003. Pasca tersusunnya dokumen *Ecoregion Conservation Plan*, pada tanggal 13 Februari 2004, ketiga negara sepakat untuk menandatangani *Memorandum of Understanding on the Adoption of the Ecoregion Conservation Plan* yang menandai terbentuknya secara resmi kerjasama tiga negara dalam pengelolaan konservasi dan sumber daya perikanan di kawasan ekoregion Laut Sulu-Sulawesi. Indonesia telah meratifikasi *MoU on the Adoption of the Ecoregion Conservation Plan* pada tanggal 23 Februari 2006 (http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabaru/176-pertemuan-ke-7 diakses pada 24 Februari 2016).

Ketiga negara sepakat untuk mengadopsi konservasi ekoregion yang diwujudkan dalam *Ecoregion Conservation Plan (ECP)*. ECP untuk SSME melibatkan ketiga negara seperti para pemangku kepentingan dan berbagai ahli, mulai dari pengguna sumber daya, manajer, dan akademisi untuk membuat kebijakan. ECP dibuat untuk mengkonservasi sumberdaya pesisir dan laut di wilayah ekoregion Laut Sulu-Sulawesi tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat setempat. Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* melahirkan *Tri-National Committee* untuk SSME. *Tri-National Committee* mengadakan pertemuan pertama pada tanggal 1 Maret 2006 di Kalimantan Timur, Indonesia dan menciptakan tiga *Sub-Committee* (*Asian Development Bank*, 2011 : IV).

Tiga *Sub-Committee* merupakan wadah bagi perumusan kebijakan, program, serta aktifitas yang bersifat tematik, yaitu :

1. Sub-Komite untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut dan Jejaring Kawasan Konservasi (*Sub-Committee on Marine Protected Areas and Networks*), dimana Filipina ditunjuk menjadi sebagai Ketua/*Chair*;
2. Sub-Komite untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (*Sub-Committee on Sustainable Fisheries*), dimana Malaysia ditunjuk sebagai Ketua/*Chair*;
3. Sub-Komite untuk Pengelolaan Species Terancam Punah, Karismatik dan Peruaya (*Sub-Committee on Threatened, Charismatic and Migratory Species*) dimana Indonesia ditunjuk sebagai Ketua/*Chair*;
4. Kelompok Kerja Para Ahli (*Task Group on Directory of Experts*), yang merupakan kumpulan para ahli berbagai bidang yang relevan dengan isu-

isu pengelolaan yang berasal dari ketiga negara anggota (http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/en/beritabaru/228-indonesia-ketua-pokja-sulu-sulawesi diakses pada 24 Februari 2016).

Tri-National Committee merupakan badan yang dibentuk oleh ketiga negara tersebut sebagai respon terhadap ancaman yang menyebabkan dekadensi kualitas lingkungan wilayah perairan di Laut Sulu-Sulawesi.

Penilaian lintas batas terbaru menunjukkan ekploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan, serta peningkatan intensitas dan kapasitas berbagai perikanan sejak 1960-an telah mengakibatkan ukuran ikan menurun. Total produksi perikanan laut di Indonesia, Malaysia, dan Filipina selama dekade terakhir menunjukkan adanya peningkatan sepuluh kali lipat dari periode 1960. Penurunan sumber daya perikanan sangat mempengaruhi situasi dari masyarakat nelayan. Untuk menangani dampak karena sumber daya yang menurun, ketiga negara akan fokus mengatasi masalah pengelolaan dan konservasi yang berkaitan dengan ikan pelagis kecil, seperti *sardines*, *long-jawed mackarel*, tongkol (http://scfishproject.iwlearn.org/news/indonesia-malaysia-filipina-percepat-kerja-sama-pengelolaan-perikanan diakses pada 27 Mei 2016). Aksi ini dilakukan melalui Sub-Komite untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.

Sejak tahun 2011-2013, Indonesia telah ditunjuk sebagai Ketua (*Chair*) dari Sekretariat Regional *Tri-National Committee*, yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Chair* dari *Tri-National Committee* ini dipilih secara bergilir setiap dua tahun sekali diantara ketiga negara. Dan pada pertemuan di

tahun 2013 diadakan pengalihan *Chair* dari Indonesia kepada Malaysia (http ://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabaru/176-pertemuan-ke-7 diakses pada 25 April 2016).

Pada tanggal 3 Desember 2014 Indonesia ditunjuk sebagai ketua kelompok kerja teknis Napoleon Wrasse di wilayah Sulu-Sulawesi yang disepakati pada pertemuan tahunan kedelapan Sub Komite Spesies Terancam Punah, Kharismatik dan Bermigrasi (*Sub Committee On Threatened, Charismatic and Migratory Species /SC Species*). Dalam pertemuan kedelapannya, *SC Species* membahas isu-isu penting pengelolaan dan perlindungan spesies di wilayah *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* serta mengupdate dan mengevaluasi implementasi Rencana Aksi Pengelolaan Spesies Terancam Punah, Kharismatik dan Bermigrasi. Delegasi Indonesia menyampaikan *Country Report* Indonesia tentang capaian aktivitas dalam konservasi dan pengelolaan Spesies Terancam Punah tahun 2013-2014 seperti penyu, Napoleon Wrasse, Hiu, Manta, dan mamalia laut (http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabaru/228-indonesia-ketua-pokja-sulu-sulawesi diakses pada 25 April 2016).

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji kerjasama trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui program *Ecoregion Conservation Plan* (ECP) di Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi tahun 2006-2014, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai acuan dalam pembahasan. Beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan oleh penulis pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Boyke Gunawan dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2014 dengan judul “Kerjasama Trilateral

Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi Melalui Program *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion*".

Dalam penelitian ini, Boyke membahas tentang kerjasama trilateral yang dilakukan oleh ketiga negara secara garis besar dan memaparkan data pencapaian kerjasama trilateral ini melalui program *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Boyke Gunawan adalah sama-sama meneliti tentang kerjasama trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Boyke Gunawan adalah Boyke lebih banyak memaparkan upaya-upaya yang dilakukan dalam program *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* khususnya dalam periode 2009-2012 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya membahas tentang upaya yang dilakukan dalam kerjasama trilateral ini melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* pada tahun 2006-2014 tetapi juga membahas tentang kerjasamanya, seperti apa manfaat dari kerjasama ini bagi masing-masing negara dan apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam menjalankan kerjasama trilateral ini bagi Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Siti Lutfi Jamilatul Wardah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 dengan judul "*Peran World Wild Fund For Nature* (WWF) Dalam Program *Heart of Borneo* (HOB) di Indonesia periode 2012-2013". Dalam penelitiannya Siti menjelaskan tentang peran dari *World Wild Fund of Nature* (WWF) dalam

program *Heart of Borneo* (HOB) di Indonesia dengan pembatasan waktu tahun 2012-2013. Siti juga menjelaskan bahwa inisiatif *Heart of Borneo* (HOB) adalah satu-satunya kerjasama lintas batas diantara pemerintah Indonesia, Brunei, dan Malaysia yang bertujuan untuk mengelola kawasan lintas batas, mengelola kawasan lindung, mengelola sumber daya alam berkelanjutan, mengembangkan ekowisata, dan meningkatkan kapasitas manusia berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti adalah sama-sama mengangkat tentang aksi konservasi. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti adalah peneliti mengangkat tentang kerjasama trilateral yang dilakukan oleh aktor negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina sedangkan Siti mengangkat tentang peran dari aktor organisasi internasional.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Natasya Muliandari dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2011 dengan judul "Implementasi WWF *Coral Triangle Program* dalam Melestarikan Ekosistem Kawasan Segitiga Terumbu Karang pada 2008-2010". Dalam penelitiannya Natasya menjelaskan pentingnya peran WWF pada program *coral triangle* sebagai program kelautan. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Natasya adalah sama-sama membahas tentang program kelautan sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Natasya adalah peneliti membahas tentang kerjasama trilateral yang dilakukan dalam bidang konservasi Laut Sulu-Sulawesi melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* dan penelitian

Natasya membahas tentang upaya dari *World Wild Fund of Nature* melalui program *Coral Triangle* di kawasan segitiga terumbu karang.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul: **"Kerjasama Trilateral (Indonesia, Malaysia, Filipina) Melalui Program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* di Laut Sulu-Sulawesi Tahun 2006-2014"**

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang ada di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Antara lain sebagai berikut:

1. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, dalam mata kuliah ini mempelajari interaksi yang dilakukan antar negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Wilayah negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina terletak di kawasan Asia Tenggara dan terjadinya interaksi oleh ketiga negara dalam bentuk kerjasama trilateral.
2. Hukum Internasional, dalam mata kuliah ini mempelajari perjanjian internasional. Kerjasama trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan kerjasama yang dibangun dengan adanya penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* yang merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional.
3. *Environmental Issues*, dalam mata kuliah ini mempelajari tentang lingkungan hidup yang merupakan salah satu isu yang ada dalam hubungan internasional.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana Kerjasama Trilateral (Indonesia, Malaysia, Filipina) Melalui Program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* di Laut Sulu-Sulawesi Tahun 2006-2014?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan minor, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui program *Ecoregion Conservation Plan* (*ECP*) di Laut Sulu-Sulawesi Tahun 2006-2014?
2. Apa manfaat dari kerjasama trilateral melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* bagi kepentingan nasional Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam pelaksanaan kerjasama trilateral melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* di Laut Sulu-Sulawesi?
4. Apa hasil dari kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* di Laut Sulu-Sulawesi?

1.2.3 Pembatasan Penelitian

Kerjasama *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME) memang telah dimulai sejak ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Aksi Konservasi Ecoregion/*Ecoregion Conservation Plan (ECP)* Laut Sulu-Sulawesi yang dilakukan oleh tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada tanggal 13 Februari 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk itu, kesepahaman batas wilayah menjadi sangat penting mengingat kerjasama trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini dilaksanakan di pusat segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*) yang terdapat di wilayah tiga negara. Laut Sulu-Sulawesi merupakan kawasan yang dihuni oleh megabiodiversitas antara lain 400 spesies alga laut, 16 spesies lamun, 5 dari 7 spesies penyu di dunia, 22 spesies mamalia laut, dan semua potensi hayati yang bernilai ekonomi tinggi. Diperkirakan sekitar 45 juta jiwa manusia hidup di kawasan ini.

Penelitian ini dimulai pada tahun 2006 dikarenakan pada tahun tersebut adalah tahun dimana Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah meratifikasi *MoU on the Adoption of The Ecoregion Conservation Plan* pada tahun 2006 dan pada tahun itu juga pada tanggal 1 Maret 2006 diadakan pertemuan pertama *Tri-National Committee* dan penelitian ini dibatasi sampai dengan tahun 2014 karena pada tahun ini diadakannya pertemuan kedelapan dimana Indonesia ditunjuk sebagai ketua kelompok kerja teknis Napoleon Wrasse di wilayah Laut Sulu-Sulawesi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kerjasama trilateral (Indonesia, Malaysia, Filipina) melalui Program *Ecoregion Conservation Plan* (*ECP*) di Laut Sulu-Sulawesi tahun 2006-2014.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan antara lain :

1. Mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui program *Ecoregion Conservation Plan* (*ECP*) di Laut Sulu-Sulawesi Tahun 2006-2014.
2. Mengetahui apa manfaat dari kerjasama trilateral melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* bagi kepentingan nasional Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi.
3. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam pelaksanaan kerjasama trilateral melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* di Laut Sulu-Sulawesi.
4. Mengetahui apa hasil dari kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* di Laut Sulu-Sulawesi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangan

bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai kerjasama trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui program *Ecoregion Conservation Plan* (*ECP*) di Laut Sulu-Sulawesi tahun 2006-2014.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Komputer Indonesia.